

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Laut merupakan wilayah yang luas, negara-negara didunia memanfaatkan laut sebagai jalur transportasi dan jalur perdagangan. Laut memiliki dimensi yang sulit untuk dimiliki karena laut bersifat *open access* dan membuat setiap orang bebas mengklaim hal tersebut membuat lautan menjadi tempat perebutan kelompok atau negara yang berkepentingan. Akibatnya banyak negara-negara yang terlibat konflik perbatasan di wilayah laut yang motifnya berupa penguasaan sumber daya alam, keamanan distribusi perdagangan dan keamanan keutuhan wilayah negara tersebut. Oleh karena itu muncul ancaman-ancaman yang dapat mengganggu keamanan negara yang memiliki wilayah laut tersebut.

Ancaman keamanan yang terjadi di lautan karena adanya pertemuan kepentingan dari suatu negara atau kelompok tertentu dengan lawan politiknya sehingga keamanan laut sangatlah sulit untuk di jaga. Luasnya lautan juga membuat potensi ancaman muncul dengan mudah dan ancaman ini terjadi karena wilayah laut yang strategis. Ancaman keamanan laut merupakan masalah yang sangat besar untuk suatu negara yang memiliki wilayah laut tersebut, karena berdampak pada kepentingan nasional suatu negara terganggu. Pendekatan dari *Copenhagen School* yang di pelopori oleh Buzan, Weaver dan de Wilde (1998) membagi keamanan menjadi dua yaitu keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional. Keduanya memiliki perbedaan yang cukup besar tetapi pada esensinya keamanan tradisional maupun keamanan non-tradisional sama-sama melindungi manusia dari ancaman keamanan yang muncul untuk mengganggu perdamaian agar mencapai suatu

Dinda Sandra Pramesthi, 2020

DINAMIKA KERJASAMA KEAMANAN TRILATERAL INDONESIA, MALAYSIA DAN FILIPINA (INDOMALPHI) DALAM MENGHADAPI ANCAMAN YANG TERJADI DI LAUT SULU-SULAWESI PERIODE 2016-2018

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, FISIP, Hubungan Internasional
www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id

kepentingan tertentu. Keamanan tradisional berubah menjadi keamanan non-tradisional karena adanya perkembangan cara perang baru oleh setiap aktor untuk mengancam keamanan manusia.

Keamanan menurut Walt (1991) didefinisikan seperti “*security studies may be defined as the study of the threat, use and control of military force*” yang berarti studi keamanan merupakan studi tentang perang, pernyataannya ini mewakili pemikiran realisme mengenai *Tradisional Security* (Sagena, 2013). Keamanan tradisional ini mengkaitkan isu-isu seperti *nuclear deterrence, balance of power dan military strategy*, yang membuat ancaman keamanan tradisional bisa diartikan sebagai bentuk ancaman yang bertujuan untuk negara menggunakan kekuatan militer atau ancaman fisik (Sagena, 2013). Keamanan non-tradisional ini muncul dari perspektif pluralism dan konstruktivisme yang merasa bahwa isu keamanan tidak hanya terfokus pada ancaman keamanan militer saja tetapi keamanan yang lebih luas dan beragam (Sagena, 2013). Seiring berjalannya waktu muncul ancaman-ancaman baru yang tidak bersifat militer dan melibatkan aktor selain negara, akibatnya isu-isu keamanan pun berkembang yang tidak hanya fokus terhadap ancaman militer tetapi menjadi ancaman nir-militer yang disebut keamanan non-tradisional. Pencakupan ancamannya pun beragam dan saling memiliki keterkaitan satu sama lain seperti ancaman keamanan lingkungan hidup, keamanan ekonomi, ancaman keamanan manusia, keamanan pangan, keamanan energi, keamanan maritim, keamanan siber dsb. Kedua bentuk ancaman ini dapat mengganggu keamanan manusia, penanganan ke dua ancaman ini pun juga berbeda. Ancaman keamanan tradisional hanya menyerang satu aktor yaitu negara dan menggunakan elemen militer, sedangkan ancaman keamanan non-tradisional bisa dilakukan oleh siapa saja (aktor negara maupun aktor non-negara) yang dapat mengganggu keamanan manusia, keamanan nasional, keamanan regional bahkan keamanan internasional.

Ancaman non-tradisional sangat sulit ditebak dan penanganannya pun beragam, sama halnya dengan yang terjadi di wilayah Sulu-Sulawesi. Ancaman di wilayah ini berupa ancaman non-tradisional yang membutuhkan penanganan yang tepat agar tidak mengganggu kepentingan ketiga negara Indonesia, Malaysia dan Filipina (IndoMalPhi) yang berbatasan langsung dengan wilayah Sulu-Sulawesi. Dalam pembahasan, penulis melakukan penelitian dari salah satu kerjasama keamanan yang dibentuk oleh ketiga negara tersebut (IndoMalPhi) dalam upaya melindungi kawasan laut Sulu-Sulawesi, karena keamanan di wilayah ini sangatlah rentan dan sering terjadi ancaman. Kekuatan dalam bidang lautan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam sebuah negara untuk menjadikan negara lebih sejahtera dan meningkatkan keamanan negara. Jika keamanan laut tidak diperhatikan bisa menjadi salah satu *boomerang* untuk negara disekitaran wilayah tersebut.

Luas wilayah lautan yang dimiliki oleh negara di Kawasan Asia Tenggara menjadikan kawasan ini menjadikan beberapa negaranya menjadi negara maritim. Hal ini membuat ancaman sering muncul terutama dari laut karena lautan yang memiliki sifat *open access*. Terutama beberapa negara yang menjadikan laut sebagai salah satu sumber penghasilan negara dan memanfaatkan laut sebagai penyambung keberlangsungan hidup. Letak geografis yang strategis juga mempengaruhi perairan di Asia Tenggara yang menjadi salah satu jalur lalu lintas perdagangan laut yang penting. Asia Tenggara memiliki jalur laut yang strategis untuk jalur perdagangan menjadi tempat lalu lintas kapal-kapal dari seluruh dunia. Kapal-kapal tersebut merupakan kapal-kapal dagang yang mengangkut barang-barang yang ingin diekspor maupun import, Selat Malaka pun menjadi salah satu jalur perdagangan yang memiliki pengaruh kuat karena menghubungkan kapal dari Samudera Hindia dan Pasifik. Akibatnya wilayah laut di Asia Tenggara memiliki potensi ancaman yang besar terutama laut Sulu-Sulawesi.

Sulu adalah sebuah provinsi di Filipina di Kepulauan Sulu dan bagian dari Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM) dengan ibu kota Jolo. Miambung merupakan ibukota kerajaan Kesultanan Sulu yang terletak di Kepulauan Sulu juga. Provinsi Sulu berada di sepanjang perbatasan selatan Laut Sulu dan batas utara Laut Sulawesi. Kepulauan Sulu merupakan salah satu wilayah yang strategis milik Filipina yang berbatasan dengan Kalimantan Utara, Indonesia dan Sabah, Malaysia. Jauh sebelum Amerika Serikat berkuasa di Kepulauan Sulu pada saat Perang Amerika dengan Spanyol pada tahun 1898, wilayah Sulu dan Mindanao menjadi tempat yang dinamis secara politik regional di kawasan Sulawesi, Kalimantan dan Kepulauan Maluku oleh karena itu hubungan dari wilayah tersebut sangat erat (Santosa, 2016). Wilayah mereka memang memiliki beberapa kesamaan budaya karena kedekatannya tersebut sebelum datangnya Bangsa Eropa. Dalam buku "Orang Laut Bajak Laut Raja Laut" yang dituliskan oleh Adrian B. Lapihan yang merupakan guru besar dari Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa Kepulauan Sulu dan Mindanao dari tahun 1700an dan 1800an memang sudah ditakuti karena banyaknya aktivitas bajak laut dan perompakan yang terjadi disana.

Spanyol tidak pernah berhasil mengendalikan Kepulauan Sulu yang berada dibawah Kesultanan Sulu terutama setelah tahun 1770 dengan kombinasi perdagangan dan perompakan budak (Amirell, 2019). Penyerangan maritim merupakan sarana utama bagi Kesultanan Sulu dan Spanyol selama Perang Moro dari tahun 1565 sampai 1876, pada abad ke-18 Spanyol memberi label 'bajak laut' (Amirell, 2019). Dalam sejarah Kepulauan Sulu bisa kita ketahui bahwa sejak dulu masyarakat Kepulauan Sulu memiliki keahlian diwilayah laut dan mengenal laut dengan sangat baik. Kekuatan utama mereka pun melalui penyerangan maritim. Sulu merupakan perairan yang berada di wilayah barat daya Filipina yang dipisahkan oleh Laut China Selatan di barat laut oleh Palawan, dari Laut Sulawesi di tenggara oleh Kepulauan Sulu dan Kalimantan ditemukan di barat daya dan Visayas di timur laut. Sedangkan Laut Sulawesi di barat Samudera Pasifik yang berbatasan dengan

Kepulauan Sulu di sebelah utara dan Laut Sulu serta Pulau Mindanao di Filipina, di sebelah timur Kepulauan Sangihe, di selatan oleh Semenanjung Minahasa Sulawesi dan di sebelah barat oleh Kalimantan Utara, Indonesia. Laut Sulawesi ini merupakan bagian dari cekungan samudera purba yang terbentuk dari 42 juta tahun lalu di sebuah lokasi yang dihilangkan. Pada 20 juta tahun lalu gerakan kerak bumi telah memindahkan cekungan cukup dekat ke gunung berapi Indonesia dan Filipina.

Gambar 1. Peta ini menunjukkan letak wilayah laut Sulu-Sulawesi yang di apit oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina

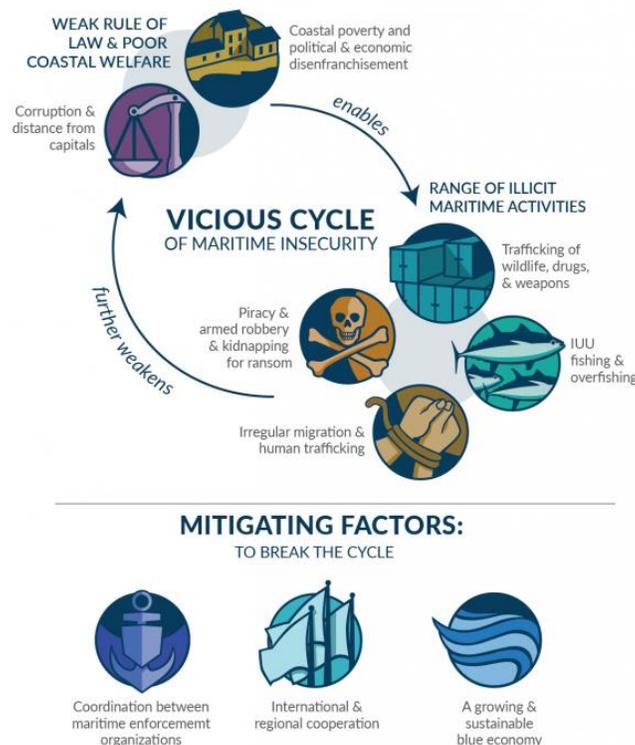


Source: docplayer.info

Potensi ancaman di wilayah laut Sulu-Sulawesi ini sangat besar, ancaman yang lebih menarik perhatian hingga ranah internasional yaitu perompakan bersenjata. Kasus perompakan di kawasan Asia Tenggara mengalami peningkatan khususnya pada tahun 2016. Tetapi tidak hanya kasus perompakan dan penculikan yang terjadi di wilayah laut Sulu tetapi ada beberapa ancaman keamanan seperti

armed robbery, kasus penyedotan bahan bakar minyak (BBC, bbc.com, 2017), *illegal fishing* (Ristiano, nasional.kompas.com, 2019), *overfishing*, keamanan ekonomi, perdagangan ilegal, *drug trafficking*, *wildlife trafficking*, perdagangan senjata, imigran gelap, dan *human trafficking* (Alexandra Amling, Curtis Bell, Asyura Salleh, Jay Benson, Sean Duncan, 2019). Tidak hanya itu laut Sulu-Sulawesi memiliki sebutan sebagai Somalia kedua, karena maraknya kasus perompakan dan penculikan di wilayah laut sulu. Data diatas membuktikan bahwa potensi ancaman yang dimiliki oleh wilayah laut Sulu-Sulawesi sangat besar dan beresiko tinggi jika tidak tindak lanjut dari negara-negara yang terkait dan potensi ancamannya berbentuk ancaman keamanan non-tradisional.

Gambar 2. Gambar ini menunjukkan keterkaitan setiap ancaman-ancaman yang terjadi di laut Sulu-Sulawesi beserta penanganan ancaman di wilayah ini



Source: stableseas.org

Keamanan ancaman yang terjadi di laut Sulu-Sulawesi memiliki banyak ragam, salah satunya ancaman perompakan dan penculikan oleh kelompok Abu Sayyaf yang berasal dari Filipina dengan latar belakang anggotanya yang memiliki pengetahuan tentang keadaan laut sekitar, aksi pembajakan ini diikuti dengan aksi *armed robbery*. Pada 26 Maret 2016 kelompok separatis¹ ini menculik 10 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia dan di serang (Armandhanu D. , 2016). Pembajakan dan penculikan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf juga terjadi pada tanggal 19 November 2016 di Sabah, Malaysia (BBC Indonesia, 2016). Abu Sayyaf merupakan kelompok yang menyebarkan teror di laut Sulu-Sulawesi kelompok separatis yang berasal dari Filipina ini didirikan oleh Abdulrajak Janjalani seorang anak dari tokoh ulama Basilan di Filipina (Wibisono, 2016). Janjalani adalah seorang veteran perang Afganistan dan Soviet yang memiliki kedekatan dengan Osama Bin Laden selama ia tinggal di Pakistan pada tahun 1980an. Latar belakang kehidupannya, Janjalani tidak setuju dengan cara kerja pemerintahan Filipina yang merasa bahwa pemerintahan dan konstitusi negara bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an (Banlaoi, Maritime Terrorism in Southeast Asia: The Abu Sayyaf Threat, 2005). Dalam rencananya untuk mengubah pemerintahan Filipina Janjalani membentuk kelompok pemberontakan yang perekrutan anggotanya di bantu oleh Osama Bin Laden dan pelatihan, rekrutmen serta bantuan suplai senjata banyak dari Al Qaeda² (Zachary, 2005).

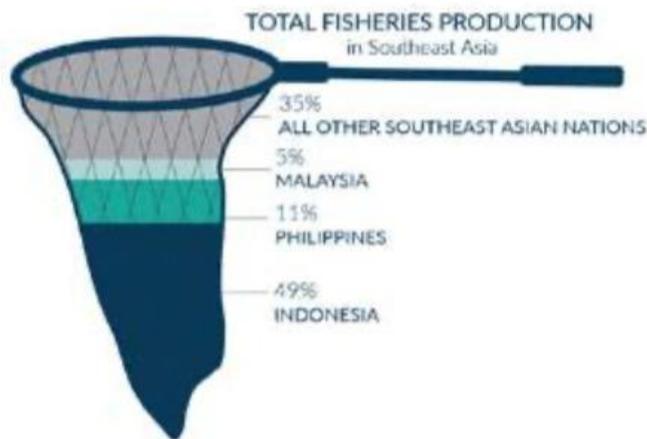
¹ Separatisme secara umum advokasi dari pemisahan budaya, etnis, suku, agama, ras, pemerintahan atau gender dari kelompok yang lebih besar (Encyclopedia, 2020), tetapi lebih sering merujuk kepermasalahan politik yang mencari otonomi yang lebih besar (Harris, 2009). Biasanya mereka membentuk sebuah kelompok yang berpikiran sama untuk mencari otonomi yang lebih besar agar suara mereka terdengar.

² Al-Qaeda yang memiliki artian 'dasar' merupakan kelompok militer islam yang di dirikan oleh Osama bin Laden pada akhir 1980an, mereka mulai sebagai jaringan logistik yang mendukung umat muslim yang berperang melawan Uni Soviet selama Perang Afghanistan, anggotanya direkrut dari umat muslim seluruh dunia (Britannica, n.d.). Al-Qaeda bergabung dengan sejumlah organisasi islam militant lainnya termasuk *Egypt's Islamic Jihad* dan *Islamic Group*, para pemimpin ini berkumpul dan menyatakan perang suci melawan Amerika Serikat (Britannica, n.d.). Organisasi ini mendirikan kamp-kamp untuk militant muslim dari seluruh dunia yang melatih puluhan ribu keterampilan paramiliter dan agen-agenya terlibat dalam berbagai serangan teroris (Britannica, n.d.).

Pada awalnya Abu Sayyaf memang tidak setuju dengan pemerintahan Filipina yang menjadikan kelompok separatis ini menjadi ancaman nasional Filipina saja, tetapi karena aksinya yang menggunakan kekerasan dengan pemboman, penculikan hingga pembunuhan yang beroperasi di wilayah Basilan, Sulu, Tawi-Tawi hingga ke pesisir Sabah, Malaysia (Banlaoi dan Rommel C., 2008). Ditambah dengan anggota dari kelompok Abu Sayyaf yang memiliki pengetahuan tentang laut sehingga mereka mudah untuk melancarkan gerakan mereka ketika di lautan. Abu Sayyaf sering melakukan aksi modus penculikan dan meminta tebusan, diduga mereka melakukan aksi ini untuk menunjukkan eksistensi mereka kepada dunia bahwa mereka memiliki kekuatan yang menakutkan.

Laut Sulu-Sulawesi merupakan tempat yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah terutama kekayaan ekosistem lautnya. Akibatnya wilayah ini menjadi tempat yang memiliki potensi ancaman yang tinggi. *Overfishing* dan *illegal fishing* sering terjadi di wilayah laut sulu yang memberikan dampak menurunnya tangkapan ikan dan stok ikan untuk negara. Produksi perikanan Indonesia mencapai angka 49% dari total perikanan di Asia Tenggara yang diikuti oleh Filipina 11% dan Malaysia 5%.

Gambar 3. Jumlah tangkapan ikan di Asia Tenggara



Source: stableseas.org

Indonesia dan Filipina mengalami kerugian hingga \$2,6 miliar akibat dari penangkapan ikan yang berlebihan dan kerusakan lingkungan laut. Kurangnya pengawasan dan penegakan pemantauan daerah pantai membuat IUUF (*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*) terus meningkat dan menguras kekayaan laut akibat dari eksploitasi berlebihan. Hal ini mengkhawatirkan karena permintaan ikan dan hewan laut untuk dimakan sangat tinggi tetapi akibat dari eksploitasi berlebihan membuat stok ikan dan hewan laut berkurang. Indonesia menjadi salah satu pemasok ikan hidup terpercaya di dunia yang memimpin dalam produksi perikanan laut. Tinggi permintaan beberapa spesies ikan membuat para nelayan menggunakan sianida untuk membuat ikan pingsan agar mudah ditangkap dan masih tetap hidup dan utuh untuk mempertahankan harga ikan (Kaye, 2014). Dengan menggunakan sianida ini ekosistem yang sudah rapuh akibat dari pertumbuhan manusia, perkembangan pesisir yang cepat, polusi dan perubahan iklim menjadi semakin parah. Menjaring dan pengeboman untuk menangkap ikan dapat merusak terumbu karang yang dapat membuat beberapa spesies terancam punah. Penangkapan hiu untuk dijadikan bahan makanan merupakan hal yang dapat mengganggu kestabilan ekosistem laut, karena hiu memiliki peran penting dalam ekosistem laut.

Wilayah pesisir pantai yang mengelilingi Laut Sulu-Sulawesi ini perekonomiannya beragam, wilayah ini memiliki Sumber Daya Alam (SDA) mentah yang di kelola oleh warga lokal untuk dijadikan sumber mata pencarian mereka, seperti minyak, gas, mineral, kelapa sawit, kelapa, kakao dan barang-barang pertanian lainnya. Kesejahteraan warga lokal yang tinggal di wilayah pesisir pantai menjadi terganggu karena keadaan pasar global yang membuat daya saing meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang cepat membuat kerugian yang berdampak pada usaha yang dilakukan oleh warga pesisir pantai. Pasang surutnya perekonomian terjadi karena munculnya separatisme politik, terorisme, marginalisasi agama, *shadow*

*economies*³, dan kejahatan terorganisir lintas-perbatasan, tetapi pemerintah berhasil membuat ancaman-ancaman yang terjadi di wilayah pesisir pantai berkurang (Alexandra Amling, Curtis Bell, Asyura Salleh, Jay Benson, Sean Duncan, 2019). Kesejahteraan warga pesisir pantai dianggap sangat penting untuk memperbaiki tata kelola laut Sulu-Sulawesi yang dapat mengurangi pasar gelap dan dapat menguntungkan warga pesisir pantai.

Pembajakan, penculikan dan *armed robbery* yang terjadi di laut Sulu-Sulawesi memang mendapatkan perhatian global, tetapi kejahatan yang sering terjadi di laut Sulu-Sulawesi yaitu perdagangan ilegal. Dalam perdagangan ilegal sendiri memiliki banyak kategori yang dapat melewati lintas batas wilayah seperti perdagangan senjata dan narkoba menjadi ancaman serius untuk wilayah sekitar laut Sulu-Sulawesi. Dilaporkan Filipina mengalami kehilangan sekitar PHP495,5 miliar atau \$3,3 miliar dalam GDP karena adanya perdagangan ilegal dari tahun 2010 sampai 2015 (Alexandra Amling, Curtis Bell, Asyura Salleh, Jay Benson, Sean Duncan, 2019). *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) memperkirakan Indonesia kehilangan \$3 miliar pendapatan pertahun hanya dari *illegal logging* (UNODC, 2012), kerugian dari *illegal fishing* dan *wildlife trafficking* diperkirakan mencapai \$8 miliar (Alexandra Amling, Curtis Bell, Asyura Salleh, Jay Benson, Sean Duncan, 2019). Perdagangan ilegal merugikan negara Malaysia sebesar \$2 miliar per tahun (Alexandra Amling, Curtis Bell, Asyura Salleh, Jay Benson, Sean Duncan, 2019).

Barang barang yang diperjual belikan ada yang legal tetapi dilakukan secara ilegal seperti menghindari biaya pajak. Hal ini membuat kerugian yang besar bagi negara karena harus kehilangan pendapatan pajak dan bisnis yang mengikuti hukum dengan baik. Perdagangan gelap di wilayah perbatasan ketiga negara ini memiliki

³ *Shadows economies* adalah kegiatan ekonomi yang tidak terdata dalam aktifitas perekonomian negara yang dapat merugikan karena dalam kegiatan tersebut tidak dilaporkan kepada negara (BeritaSatu, 2019).

banyak penyebab, termasuk geografi yang sangat menantang, kesadaran domain maritim yang buruk, kehadiran negara yang lemah, korupsi, kemiskinan di wilayah pesisir, dan kehadiran kelompok-kelompok gelap aktor non-negara (Alexandra Amling, Curtis Bell, Asyura Salleh, Jay Benson, Sean Duncan, 2019). Tetapi untuk mencari solusi dari permasalahan ini sangat sulit, karena banyak masyarakat wilayah pesisir yang perekonomiannya tergantung pada *shadow economies*. Akibatnya ke tiga negara Indonesia, Malaysia dan Filipina mengalami kerugian besar dari aktifitas perdagangan ilegal.

Migran yang umum ditemui di Asia Tenggara merupakan para pencari suaka untuk mencari perlindungan dari konflik yang terjadi di negaranya dan migran ekonomi yang mencari peluang kerja di negara lain. Tetapi di wilayah laut Sulu-Sulawesi lebih banyak ditemukan migran ekonomi dibandingkan pencari suaka. Migrasi maritim terdorong dari faktor kekerasan fisik atau tertarik karena faktor ekonomi yang menjanjikan di wilayah tersebut (Alexandra Amling, Curtis Bell, Asyura Salleh, Jay Benson, Sean Duncan, 2019). Sehingga migran tertarik untuk berpindah ke wilayah tersebut dengan harapan perekonomian mereka membaik. Sabah, Malaysia merupakan wilayah yang banyak di tempati warga non-negara (diluar warga negara Malaysia) seperti dari Bangladesh, Burma, Kamboja, India, Nepal, Filipina dan Vietnam (Alexandra Amling, Curtis Bell, Asyura Salleh, Jay Benson, Sean Duncan, 2019). Tetapi ekonomi masyarakat pesisir pantai dapat menurun akibat dari banyaknya migran ekonomi yang membuat persaingan masyarakat meningkat. Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang paling sering dikunjungi oleh para pencari suaka dari negara yang sering berperang seperti Afganistan, Irak, Myanmar dan Suriah, jalur yang mereka lewati wilayah laut Sulu-Sulawesi. Jalur maritim ini dapat memperkuat jaringan penyelundupan regional karena sering dijadikan, motif mereka mencari suaka akibat terjadinya perang, kekerasan politik, terorisme, dsb di negara mereka.

Pergerakan migrasi di lautan pun tidak semuanya dapat di awasi, muncullah kekhawatiran ranah regional jika perdagangan manusia meningkat khususnya perdagangan untuk eksploitasi seksual dan perdagangan organ manusia dalam pasar gelap (Alexandra Amling, Curtis Bell, Asyura Salleh, Jay Benson, Sean Duncan, 2019). Laut Sulu-Sulawesi merupakan salah satu wilayah yang sering menjadi tempat perdagangan manusia yang diperbudak melakukan kerja paksa, eksploitasi seks, pengantin muda dan adopsi. Terutama Filipina yang menyumbang sekitar 784.000 orang yang di perbudak, permintaan untuk industri seks komersial cukup tinggi tidak hanya itu Filipina tercatat dalam perdagangan organ secara global (Alexandra Amling, Curtis Bell, Asyura Salleh, Jay Benson, Sean Duncan, 2019). Perdagangan manusia sangat rentan terjadi akibat tingginya permintaan tenaga kerja murah, pengantin muda dan seks dengan anak di bawah umur. Kasus ini juga dilakukan masyarakat akibat faktor perekonomian dan politik yang membuat mereka mengharapkan anak-anak mereka dapat berkontribusi dalam membantu perekonomian. Filipina sendiri sangat terkenal dengan pariwisata seks yang terkenal secara manca negara, hal ini cukup umum diwilayah ini. Terutama anak perempuan yang banyak diperdagangkan untuk menjadi budak seks, jika anak laki-laki mereka dipaksa masuk kelompok bersenjata atau melakukan kerja paksa. Filipina juga terkenal dengan kasus perdagangan organ terutama ginjal yang korbannya merupakan masyarakat miskin, hal ini membuat Filipina menjadi salah satu negara yang memiliki masalah perdagangan manusia tertinggi.

Ancaman-ancaman di wilayah laut Sulu-Sulawesi membuat kerjasama keamanan trilateral Indonesia, Malaysia dan Filipina (IndoMalPhi) ini terbentuk karena memiliki tujuan yang sama untuk melindungi wilayah ini dari ancaman-ancaman yang terjadi dari luar maupun dalam. Wilayah laut Sulu-Sulawesi menjadi tempat strategis perekonomian, politik dan keamanan, karena wilayah ini merupakan salah satu jalur perdagangan kapal-kapal besar yang tidak dapat melalui jalur di Selat Malaka. Tidak hanya itu sumber daya alam di laut ini sangat banyak dan berlimpah

membuat banyak ancaman yang terjadi di kawasan strategis ini. Oleh karena itu pertahanan serta keamanan laut Sulu-Sulawesi memerlukan perhatian lebih khusus terutama ketiga negara yang berdekatan langsung dengan laut Sulu-Sulawesi. Banyaknya ancaman yang terjadi di wilayah ini membuat keamanan Indonesia, Malaysia dan Filipina (IndoMalPhi) maka mereka sepakat mengupayakan peningkatan keamanan maritim di wilayah ini. Pada akhirnya ketiga negara ini sepakat untuk melaksanakan patroli bersama di laut Sulu-Sulawesi. Kerjasama ini ditandai dengan pertemuan ketiga Menteri Luar Negeri dari ketiga negara IndoMalPhi pada tanggal 5 Mei 2016 untuk mengadakan deklarasi bersama atau *Joint Declaration on Immediate Measures to Address Security Issues in the Maritime Areas of Common Concern among Indonesia, Malaysia and the Philippines*.

Pada tanggal 20 Juni 2016 Menteri Pertahanan dari ketiga negara IndoMalPhi bertemu dan menghasilkan *Joint Statement Among the Defence Ministers of the Philippines, Malaysia and Indonesia* sebagai landasan kerjasama keamanan dan pada tanggal 22 Juni 2017 *Joint Statement Trilateral Meeting on Security Among Philippines, Indonesia and Malaysia*. *Joint statement* yang pertama di hadiri oleh Sekretaris Pertahanan Nasional Republik Filipina, H.E. Voltaire T. Gazmin; Menteri Pertahanan Malaysia, H.E. Dato 'Seri Hishammuddin Tun Hussein; dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, H.E. Jenderal (R) Ryamizard Ryacudu, dalam pertemuan ini ketiga negara lebih memfokuskan pertahanan negara dalam kasus terorisme. Sedangkan *joint statement* yang kedua dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, H.E. Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Malaysia, H.E. Dato Sri Anifah Hj. Aman dan Sekretaris Luar Negeri Republik Filipina, H.E. Alan Peter S. Cayetano, dalam pertemuan ini ketiga negara lebih memfokuskan keamanan negara dalam menangani tantangan dan ancaman transnasional yang sering muncul di wilayah laut sulu. Kedua *joint statement* ini memiliki keterkaitan satu sama lain dalam menjaga pertahanan dan keamanan dari kerjasama keamanan ini.

Program yang dilakukan di dalam kerjasama keamanan trilateral ini merupakan *Trilateral Cooperative Arrangement (TCA)* yang meliputi patroli udara, patroli maritim, pembagian informasi intelejen, pembentukan *Maritime Command Center (MCC)* dan latihan gabungan yang dilaksanakan Indonesia, Malaysia dan Filipina (*IndoMalPhi*) untuk memperkuat keamanan di laut Sulu-Sulawesi. Kelangsungan program ini berhasil dalam menangani ancaman yang terjadi di laut Sulu-Sulawesi, patroli udara dan juga patroli maritim berhasil mengatasi penculikan dan pembajakan yang dilakukan oleh Abu Sayyaf dan menyelamatkan lusinan sandera. Pada awal April 2019 pasukan keamanan Filipina berhasil menyelamatkan nelayan Indonesia yang ditanggap Kelompok Abu Sayyaf yang menyerang kapal penangkap ikan yang dia operasikan bersama dengan satu warga negara Indonesia dan Malaysia pada 5 Desember 2018. Kerjasama trilateral ini membuat Indonesia, Malaysia dan Filipina (*IndoMalPhi*) menjadi lebih siap menghadapi ancaman-ancaman yang terjadi di wilayah laut Sulu-Sulawesi mendekati teritorial ketiga negara tersebut. Kerjasama ini menjadi wujud kepedulian ketiga negara tersebut dengan keamanan negara mereka sendiri.

Penulis menggunakan konsep *cooperative security*, konsep ini dapat menggambarkan terjadinya kerjasama keamanan trilateral yang terjadi di laut Sulu-Sulawesi. Kerjasama kemananan ini terjadi akibat munculnya ancaman yang sama meresahkan ketiga negara tersebut yang dapat berdampak buruk bagi negara, maka salah satu cara penanggannya yaitu melakukan kerjasama keamanan untuk menangkap aksi-aksi ancaman tersebut. Konsep *cooperative security* penulis anggap sangat efektif dalam menangani ancaman yang terjadi di laut Sulu-Sulawesi, karena kerjasama keamanan ini membuat ancaman yang terjadi di wilayah ini menurun pesat. Program-program yang dilakukan oleh kerjasama keamanan ini cukup efektif dalam menangani ancaman-ancaman yang terjadi di laut Sulu-Sulawesi.

1.2 Rumusan Masalah

Ancaman sering kali muncul di wilayah laut yang memiliki letak yang strategis dan memiliki banyak sumber daya alam. Lautan sendiri memiliki sifat *open access* yang membuat banyak kepentingan dapat masuk secara bebas. Sifat yang dimiliki lautan pun memicu munculnya ancaman-ancaman yang dapat terjadi akibat perebutan kepentingan. Hal ini terjadi di laut Sulu-Sulawesi yang berbatasan langsung dengan Indonesia, Malaysia dan Filipina (IndoMalPhi) wilayah ini merupakan tempat yang sangat strategis dan memiliki sumber daya alam mentah yang melimpah. Wilayah laut Sulu-Sulawesi ini menjadi tempat berkumpulnya ancaman-ancaman non-tradisional yang membuat keamanan Indonesia, Malaysia dan Filipina terganggu. Indonesia, Malaysia dan Filipina membentuk kerjasama kemananan trilateral pada tahun 2016 untuk melindungi wilayah laut yang bebatasan langsung dengan ketiga negara ini. Tingginya ancaman di wilayah laut Sulu-Sulawesi terjadi pada tahun 2016, namun akibat dari program-program yang dilakukan selama kerjasama keamanan ini tingkat ancaman mulai menurun pada tahun 2018. Pada periode 2016 hingga 2018 banyak yang terjadi dalam kerjasama keamanan ini yang membuat penulis tertarik untuk membahasnya. Berdasarkan latar belakang diatas, pertanyaan penelitian dari skripsi ini adalah:

“Bagaimana Dinamika Kerjasama Keamanan Trilateral Indonesia, Malaysia dan Filipina (IndoMalPhi) dalam Menghadapi Ancaman yang Terjadi di Laut Sulu-Sulawesi Periode 2016-2018?”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menggambarkan apa saja yang terjadi selama berlangsungnya kerjasama keamanan trilateral Indonesia, Malaysia dan Filipina (IndoMalPhi) dalam mengatasi ancaman-ancaman yang terjadi di laut Sulu-Sulawesi periode 2016-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Penulis berharap dapat memberikan gambaran kepada para pembaca serta menjadi acuan untuk penelitian tentang dinamika kerjasama keamanan trilateral Indonesia, Malaysia dan Filipina pada periode 2016-2018 untuk melindungi laut Sulu-Sulawesi dari ancaman-ancaman yang sering terjadi di wilayah ini.
- b. Penulis berharap dapat memberikan pemahaman kepada para pembaca tentang kerjasama maritim dan dapat memahami model kerjasama trilateral ini apakah kerjasama ini efektif apa tidak untuk menangani ancaman-ancaman yang terjadi di laut Sulu-Sulawesi.

1.5 Sistematika Penelitian Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis ingin menjelaskan latar belakang kerjasama keamanan trilateral Indonesia, Malaysia dan Filipina yang dibentuk pada 2016 untuk menangani ancaman-ancaman yang terjadi di laut

Sulu-Sulawesi. Didalam bab ini terdapat perumusan masalah yang berada di latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis ingin menjelaskan tentang referensi penelitian terdahulu yang penulis ingin dijadikan bahan acuan dalam penulisan penelitian ini. Selain itu penulis ingin menjabarkan konsep yang penulis gunakan menjadi pisau analisis

penelitian ini, penulis menggunakan konsep *cooperative security*. Konsep tersebut didapat dari berbagai sumber untuk mencari pengertian konsep yang sesuai dengan pembahasan yang ingin penulis analisis lebih dalam. Bab ini juga menjelaskan tentang *literature review*, alur pemikiran dan asumsi yang penulis buat terkait dengan pembahasan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini. Dalam bab ini penulis menjabarkan tentang pendekatan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif. Selain itu jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV: DINAMIKA KERJASAMA KEAMANAN TRILATERAL INDONESIA, MALAYSIA DAN FILIPINA (INDOMALPHI) DALAM MENGHADAPI ANCAMAN YANG TERJADI DI LAUT SULU-SULAWESI PERIODE 2016-2018

Bab ini berisikan tentang ancaman-ancaman yang sering terjadi di wilayah laut Sulu-Sulawesi yang mengakibatkan terbentuknya kerjasama keamanan yang dibuat oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina sebagai salah satu usaha untuk mengurangi ancaman-ancaman yang dapat merugikan ketiga negara yang berbatasan langsung dengan wilayah laut tersebut. Dalam bab ini penulis menunjukkan seberapa besar potensi ancaman yang dimiliki wilayah ini dan berkumpulnya ancaman-ancaman.

Selanjutnya penulis menjelaskan tentang analisis yang penulis didukung oleh konsep yang penulis gunakan dalam kerangka konseptual serta data-data yang penulis peroleh dari berbagai sumber untuk menjelaskan dinamika yang terjadi selama kerjasama keamanan trilateral Indonesia, Malaysia dan Filipina atau disingkat IndoMalPhi dari ancaman-ancaman yang terjadi di laut Sulu-Sulawesi periode 2016-2018. Penulis juga membahas tentang program-program yang dilaksanakan oleh kerjasama keamanan trilateral ini.

BAB V: KESIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan merujuk pada rumusan masalah yang di jabarkan di bab pertama tentang “Bagaimana Implikasi Kerjasama Keamanan Trilateral Indonesia, Malaysia dan Filipina (Indomalphi) Terhadap Dinamika Ancaman di Laut Sulu-Sulawesi Periode 2016-2018?”